

REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM Pemilihan Kepala Daerah

Penulis :
Dr. Fajrian Noor Anugrah, S.H., M.H.



CV. STRATA PERSADA ACADEMIA

Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Penulis:

Dr. Fajrian Noor Anugrah, S.H., M.H

Editor:

Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H

Desain Cover:

Tim Creative

Tata Letak:

Katon Pratondo

Ukuran:

i - iv, 1- 330, uk: 15.5x23 cm

ISBN:

978-634-96166-0-7

Cetakan Pertama:

Juni 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by CV. Strata Persada Academia

All Right Reserved

DILARANG KERAS MENERJEMAHKAN, MEMFOTOKOPI, ATAU MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT.

PENERBIT:

CV. Strata Persada Academia

Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45183

Website: www.stratapersada.com

Instagram: @stratapersada

Email: admin@stratapersada.com

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan dan penyusunan buku berjudul "*Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik dalam menjawab kompleksitas permasalahan regulasi dan praktik politik hukum yang mengiringi dinamika pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, sekaligus menjadi refleksi terhadap pentingnya landasan keadilan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Pilkada merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, regulasi yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah tidak jarang menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum yang melingkupinya. Ketidakseimbangan dalam ketiga elemen tersebut dapat menghambat terwujudnya sistem pemilihan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Buku ini terbagi ke dalam tujuh bab yang disusun secara sistematis. Mulai dari pendahuluan hingga pentingnya keadilan Pancasila sebagai basis normatif dan filosofis dalam merumuskan serta merekonstruksi politik hukum Pilkada di masa depan, termasuk pembahasan perbandingan dengan sistem pemilihan di beberapa negara lain.

Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai perlunya perombakan paradigma dalam politik hukum pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa masukan intelektual maupun semangat moral, sehingga buku ini dapat tersusun dan diterbitkan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Banjarmasin, 10 Mei 2024

Fajrian Noor Anugrah
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB 2.....	9
Regulasi dan Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah	9
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembentukan Regulasi	9
B. Pengertian dan Dasar Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	24
BAB 3.....	61
Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah	61
A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum	61
B. Pengertian dan Dasar Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	68
BAB 4.....	105
Kelemahan Regulasi Politik Hukum Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah	105
A. Kelemahan Struktur Hukum (<i>structur of law</i>)	108
B. Kelemahan Substansi Hukum (<i>substance of the law</i>)	145
C. Kelemahan Budaya Hukum (<i>legal culture</i>)	189
BAB 5.....	196
Urgensi Basis Keadilan Pancasila dalam Hukum Pemilihan Kepala Daerah.....	196
BAB 6.....	235
Urgensi Rekonstruksi Regulasi Politik Hukum Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	235

A. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi	235
B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Berdasarkan Pancasila	239
C. Pembahasan Rekonstruksi Regulasi Politik Hukum Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	247
D. Perbandingan dengan Sistem Pilkada di Luar Negeri	252
BAB 7.....	262
Rekonstruksi Regulasi Politik Hukum Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	262
DAFTAR PUSTAKA.....	321

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku dan Jurnal Ilmiah:

- Adnan Buyung Nasution, 2010. *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Kompas;
- Al Mawardi, 2015. *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Jakarta: Al-Azhar Press;
- Anthon F. Susanto, 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis (Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing;
- Abdullah. H Rozali, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Depok: PT Raja Grafindo Persada;
- Ajib Thohir, 2009. *Studi Kawasan Dunia Islam Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Arif Kristiawan*, Sri Endah Wahyuningsih**, Rakhmat Bowo Suharto "Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara" *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018
- Ann Seideman, dkk., *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, diterjemahkan Johannes Usfunan, ELIPS, Jakarta, 2002,
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", makalah disampaikan pada karya Latihan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985
- Afifuddin Muhajir, 2017, *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD.

- Ahmad Hamidi, dkk, 2022. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Bengkulu: Adhra Grafika,
- Bambang Daroeso dan Suyarno, 1989, “*Filsafat Pancasila*”, Yogyakarta: Liberty;
- Bagir Manan, 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH-FH UII;
- Bagir Manan, 1992. *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co
- Bayu Surianingrat, 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia (Babak Hindia Belanda dan Jepang)*, Malang: Dewaruci Press
- Bernard Arief Sidharta, 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Pondasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju;
- Bintan R. Saragih, *Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*;
- Bryan A. Garner, 1999. *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group;
- B.N. Marbun, 1996. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- BPHN, 2019, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan No. PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019*,
- Barda Nawawie Arief, 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius Dalam Rangka Optimilisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Peneribit UNDIP,
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011. *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*,.

- Dawan Raharjo, 1996. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan konsep-konsep Kunci* Jakarta: Paramadina, hlm.
- Ekayanti, R. 2015. Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* terkait penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, 4 (1),
- Esmi Warrassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Cet. I*, Semarang: Suryandaru Utama,
- Esmi Warassih P, 2001. Fungsi Cita Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan Yang Demokratis. *Majalah: Arena Hukum: FH Unibraw No. 15 tahun 2004*,
- Dickson Adom, Akwasi Yeboah Attah Kusi Ankrah, "Constructivism Philosophical Paradigm: Implication for Research, Training, and Learning", *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences* vol. 4, No. 10 (2016);
- DKPP RI. Penyelenggara Pemilu Di Dunia. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI);
- Fauzi Ismail,. 2005. *Libatkan Rakyat Dalam Pengambilan Kebijakan*, Yogyakarta: Forum LSM,
- Gatot Eddy Pramono, 2022 "*Pemolisian Humanis (Transformasi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan)*" Jakarta: PT. Gramedia,
- H.J de Grad. 1981. *Awal Kebangkitan Mataram, Masa Pemerintahan Senopati (De Regering Van Pemerintahan Senopati Ingalaga)*. Jakarta: Pustaka Grafiti Press.
- Hans Kelsen, 2014. *Teori Hukum Murni*, (Penerjemah: Raisul Mutaqien), Bandung: Nusa Media;
- Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata, 2000. Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana, Jakarta: HuMa;
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertasi Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana,

- I Dewa Gede Atmadja, 2013. *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Press,
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani "Formulasi Legislative Drafting Yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. NO. 3 VOL. 22 JULI 2015;
- Ichtiar Baru Van Hoeve; Hasan Shadily. *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. Enkulturası adalah proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya;
- I.B.G. Suryatmaja M., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, dimuat dalam Roundtable Discussion diterbitkan oleh Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Suharizal "Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang;
- Imran Juhaefah, *Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Disertasi (Makassar: Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, 2011),
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Perihal Undang-Undang*, Depok: PT RajaGrafindo
- Jimly Asshiddiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve;
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer;
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

- Jimly Asshiddiqie, 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers,
- Jeremy Bentham dalam Cavendish Law Cards Jurisprudence, Cavendish Publishing, London, 1997, hlm. 83
- John Rawls, 1993. *Political Liberalism, Expanded Edition*, New York: Columbia University Press, hlm.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994. *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal usul dan perkembangannya)*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti;
- Lawrence M. Friedman, 1984. *American Law*, London: W.W Norton & Company;
- Libonati, M. E. "States Constitutions and Local Government in The United States" dalam Steytler, N. (2005). *The Place and Role of Local Government in Federal Systems*. Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftung;
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya;
- Mahfud MD, 2012. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo;
- Miriam Budiardjo, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama;
- Muhadam Labolo, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai;
- Muhadam Labolo dan Teguh, 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Maria Farida Indrati S., 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.
- M. Gaffar Janedjri, 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press,
- Moh. Mahfud MD, 2020. *Politik Hukum di Indonesia edisi revisi cet. IV*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada,

- Mohammad Daud Ali, 2019. *"HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum islam di Indonesia"* Jakarta: RajGrafindo Persada, (Cetakan Ketiga):
- Mokhammad Samsul Arif, Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 2 No. 1, November 2020
- Padmo Wahjono, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia,;
- Padmo Wahjono, *"Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan"*, dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991;
- Peter Mahmud Marzuki 2008. *"Pengantar Ilmu Hukum"* Jakarta: Kencana,
- P. M Rondonuwu, 2021. *Teori Hukum dari Eksestensi ke Rekonstruksi*. Depok: Raja Grafindo,
- Putera Astomo, 2017. *"Ilmu Perundang-undangan, Teori dan Praktik di Indonesia"* Depok: PT RajaGrafindo Persada,
- Pahlevi, F. S. 2016, *Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia. Justicia Islamica*, Vol. 13 (2),
- Pippa Norris dan Alessandro Nai (eds.), 2017. *Election Watchdogs*, New York: Oxford University Press,
- Riyaas Rasyid, 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia;
- Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, 2015. *Pilkada; Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta: Bestari;
- Rachmat Trijono dan Indah Harlina, 2022. *Politik Hukum Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti,
- RB. Soemanto, 2006. *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*, Surakarta: Sebelas Maret University Press;
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991;

- Soedarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Saldi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Soedarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumi;
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.III
- ,1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious System*, Semarang: UNISSULA Press,
- Sukarno Aburaera, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006;
- Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, 2012. *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barba; Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*, Yogyakarta: Thafa Media;
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty;
- Sarundajang, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Problematika dan Prospek*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka;
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014;
- S. Khuda Bakhsh, 1954. *Politics in Islam*, Lahore Pakistan: SH. Muhammad Ashraf,
- Tim Connor dan Fiona Haines, "Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The

- Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufacturers”, *Theoretical Criminology*, Vol. 17, 2013;
- Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember 1973;
- Topo Santoso, 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada,
- Talizidhuhu Ndraha, 2003. *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta;
- Toni Andrianus, dkk, 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung: Nuansa;
- Tambir, I. M, 2019. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, 8 (4),
- Teguh Prasetyo, 2018. *DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas PANCASILA*, Jakarta: Gramedia;
- Yusriyadi, Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 18 Pebruari 2006;
- Wilma Silalahi. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020,
- Winarno Surachmad, 1973. *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodolgi Ilmiah*, Bandung: CV Tarsito,
- W. Montgomery Watt, 1980. *Islamic Political Thought*. Edinburg: Edinburg University Press,
- Wahyu Widodo, Gunarto, Gjauhari, 2016. *Politik Hukum, “Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila”*, Semarang: Universitas PGRI Press,

Zulkifli Suleman, 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Penerbit Kompas;

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Internet

Bernard Arief Sidharta, ter kutip dari MYS, Menggali Karakter Hukum Progresif Satjipto Rahardjo,

<http://www.hukumonline.com> ,diakses pada tanggal 14/01/2023

B. Arief Sidharta, terkutip dari MYS, Menggali Karakter Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 14/01/2023

Normand Edwin Elnizar, "Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat," Hukum Online.Com, 2018,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/>. Diakses 01/06/2023

Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) diakses 02/02/2023

Baca artikel detiknews, "Tuntutlah Ilmu Pemilu Sampai Ke Negeri Ginseng" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-5045084/tuntutlah-ilmu-pemilu-sampai-ke-negeri-ginseng>.
Diakses 02/02/2023

Arti kata serentak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online
diakses 21/01/2023

Pengertian Demokrasi, Sejarah, dan Pelaksanaannya di Indonesia (hukumonline.com) diakses 25/07/2023

Hasyim Asy'ari, "Mempertahankan Pemilihan Kepala Daerah Langsung",
<http://perludem.org/2014/09/09/mempertahankan-pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-hasyim-asyari/> ,
diunduh 22 juli 2023.

Pemerintah Usulkan Perppu Percepatan Pilkada 2024 | Republika Online, diakses 10/10/2023

Robi Ardianto, 2020. Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (bawaslu.go.id), diakses 25/12/2023s